

DAFTAR BACAAN

Buku

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Baraktullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, 2019.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed, MN: West Publishing Co., St. Paul, 2009.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Kotler, Philip, *Prinsip - prinsip Pemasaran Edisi 12*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Majalah Warta Ekonomi, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian HUKUM*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Prihantoro, Rudy, *Konsep Pengendalian Mutu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, 2018.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Edisi Cetakan ke-3*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Suardi, Rudi, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000 Penerapannya Untuk Mencapai TQM*, PPM, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Susanto, Happy, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013
- Kementerian Pertanian. *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida*, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Jakarta, 2020.

SKRIPSI

- Audyanza Manaf, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Pupuk Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Novita Wulandari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

Jurnal Hukum

- Abroor, D. D., & Zulfiani, A., *Tindak Pidana Ekonomi dalam Distribusi Pupuk Subsidi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2024.
- Az Nasution, *Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Djalil, Y, *Kekosongan Hukum dalam Penindakan Pupuk Palsu*, Seminar Nasional Hukum Pangan dan Pertanian, Universitas Padjadjaran, 2022
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi, Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Handoko, D, *Pertanggungjawaban Produk dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 2012.
- Hanisah, M., & Juliana. *Pengaruh Mutu Intensifikasi Terhadap Produksi pada Usahatani Kelapa Sawit (Elaeis guenensis, Jacq) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur*. Agrisamudra, 2015.
- Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). *Optimalisasi Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023*. Binamulia Hukum.
- Hidayati, F., Yonariza, Y., Nofaldi, N., & Yuzaria, D. (2019). *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu : Sebuah Tinjauan*. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 2019.
- Imanuel Berin et al., *Pra Desain Pabrik Triple Superphosphate (TSP) dari Batuan Fosfat*, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 2020.
- Joko Siswoyo, *Tinjauan Hukum Perjanjian Pendistribusian Pupuk*, Universitas Medan Area, 2022
- Nugroho, D, *Analisis Infrastruktur Laboratorium Pengujian Pupuk di Indonesia*, Jurnal Sains Tanah Indonesia, 2020
- Putra A. R, *Tantangan Penegakan Hukum pada Peredaran Pupuk Ilegal*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 2023.
- Sarah Ananda Putri, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi Pupuk yang Menyebabkan Kerugian bagi Konsumen*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023
- Sari, D. N, *Dampak Peredaran Pupuk Palsu terhadap Petani di Jawa Tengah*, Jurnal Agribisnis Indonesia, 2021.
- Setyawan, A, *Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Pupuk Kimia Tidak Standar di Lahan Pertanian*, Jurnal Ekologi dan Lingkungan, 2023.
- Sulastri, M, *Kesadaran Hukum Petani terhadap Peredaran Produk Pertanian Ilegal*, Jurnal Pendidikan dan Sosialisasi Hukum, 2021.
- Tambunan, Togap. *Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Pangan*. (Infokop Nomor 28 Tahun XXII). 2006.

Media Daring

- Arif Yulianto, *Mabes Polri Buka Penyidikan Kasus Pupuk yang Diproduksi di Gresik*, *Lintasperkoro.com* (Online), 16 Januari 2025, h 1 <https://lintasperkoro.com/baca-7946-mabes-polri-buka-penyidikan-kasus-pupuk-yang-diproduksi-di-gresik>.

- Adhityo Adyahardiyanto, *Industri Pupuk Wajib SNI*, Pro Legal (Online), 16 Mei 2023, h 1, <https://prolegal.id/industri-pupuk-wajib-sni-simak-pembahasannya>
- Deny Irwanto, *Polisi Sita 196 Ton Pupuk Ilegal dari Sukabumi*. Medcom.id (Online), 5 September 2016, h 1, <https://www.medcom.id/nasional/metro/4KZXj0Jb-polisi-sita-196-ton-pupuk-ilegal-dari-sukabumi>
- Hanin Marwah, *Mentan Cabut Izin 4 Perusahaan Pemalsu Pupuk, Kontrak Senilai Rp18,7 Miliar Dibatalkan*, Tempo (Online), 28 November 2024, h1, <https://www.tempo.co/ekonomi/mentan-cabut-izin-4-perusahaan-pemalsu-pupuk-kontrak-senilai-rp18-7-miliar-dibatalkan-1174293>
- Kementerian Keuangan, *'Jaga Pertumbuhan Ekonomi 2024, Menkeu: Pemerintah Akan Perhatikan Konsumsi, Investasi, Ekspor, Impor'*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Online), 6 Agustus 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/jaga-pertumbuhan-ekonomi-2024>
- Ni Luh Anggela, *Terungkap, Empat Perusahaan Pupuk Masuk Daftar Hitam Kementan*. Bisnis.com (Online), 27 November 2024, h 1, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241127/12/1819431/terungkap-empat-perusahaan-pupuk-masuk-daftar-hitam-kementan>
- Nirmala Maulana Ahmad, *Kementan "Blacklist" 4 Perusahaan dan Cabut Izin Edar, Terkait Pupuk*, Kompas.com, 27 November 2024, h 1, <https://money.kompas.com/read/2024/11/27/124147226/kementan-blacklist-4-perusahaan-dan-cabut-izin-edar-terkait-pupuk>
- Rudi Kurniawansyah, *Peredaran 10 Ton Pupuk Ilegal di Dumai Digagalkan*, Metrotv News (Online), 20 November 2024, h 1, <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrwLm-peredaran-10-ton-pupuk-ilegal-di-dumai-digagalkan>
- Tety Polmasari, *'Pupuk Ber-SNI versus Pupuk Palsu dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Global'*, Pos sore (online), 16 September 2022, h 1 <<https://posore.id/pupuk-ber-sni-versus-pupuk-palsu-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-global/>>.
- Tim Hukumonline, *'Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli'*, Hukum Online.Com (Online), 30 September 2022, h 1-2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/MIND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/20117 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, Pasal 2 dan Pasal 5.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts./SR.340/M/01/2025 Tentang Lembaga Uji Mutu Dan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah.

Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran.

Standar Nasional Indonesia SNI 7763:2018 Tentang Pupuk Organik Padat

Standar Nasional Indonesia SNI 2803:2012 Tentang Pupuk NPK Padat.